

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

*Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial*



OLEH:

SUSI SUSANA
10873002786

Kosentrasi Perpajakan

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2012

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

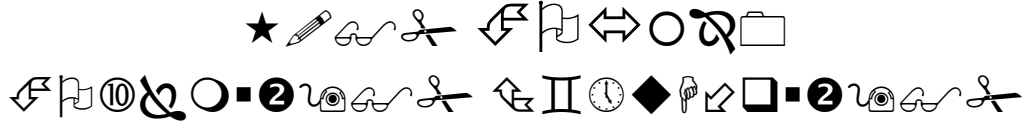
Pelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2012 sampai bulan Juni 2012 dengan objek penelitian masyarakat yang berdomisili di Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan jasa, Pendapatan dan Sanksi mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat (wajib pajak) / jumlah kepala keluarga yang berdomisili di Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi yang berjumlah 17.212 orang. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive sampling dan penerikan sampel peneliti an menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10%.

Penulis melakukan penelitian berdasarkan tehnik pengambilan data melalui penyebaran kuesioner. Analisa data yang penulis gunakan besifat Kuantitatif yaitu menganalisa data melalui persamaan regresi linear berganda dengan uji t persial dan uji f simultan.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa uji ANOVA didapat f hitung 85.644 dengan tingkat signifikan 0.000 hal ini menunjukkan pengaruh variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan, karena f tabel $(2.311) < f$ hitung (85.644) dan probabilitas jauh diatas 0.05. maka ke lima variabel secara bersama-sama mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya secara Parsial t hitung Kelima variabel tersebut $(-0.948, -2.637, -0.493, 20.6401, \text{ dan } 1.114)$ ada 2 (Pendidikan dan Pendapatan) variabel yang besar dari t tabel dan ada 3 (Kesadaran, Pelayanan Jasa, dan Sanksi) variabel yang kecil dari t tabel (1.985) . maka disimpulkan bahwa 2 variabel (Pendidikan dan Pendapatan) dalam penelitian ini berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan 3 variabel (Kesadaran, Pelayanan Jasa, dan Sanksi) tidak berpengaruh terhadap Partisipasi masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya dilihat dilihat dari uji Determinasi yang mana nilai R sebesar 0.906^a dan R^2 sebesar 0.810 atau 81 %. variabel independen mempengaruhi variabel dependen, sebesar 19 % di pengaruhi oleh variabel lainnya.

Kata Kunci : Partisipasi masyarakat dalam Membayar PBB, Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan, dan Sanksi.

KATA PENGANTAR



Setinggi puji sedalam syukur disertai Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, yang telah memberikan rahmat, nikmat kesehatan, hidayah, dan kesempatan dari Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karna atas perjuangan dan pengorbanan beliau kita dapat hidup di zaman yang berintelektualitas dan dalam masa modrenisasi islam yang maju seperti di kampus madani UIN SUSKA RIAU Pekanbaru.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima masukan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:.

1. Ayahanda Tamrin dan Ibunda Siti Hasanah yang telah memebesarkan dan mendidik ananda hingga ananda dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Semua yang Ayah dan Bunda berikan tidak akan mungkin bisa ananda balas. Dan akan selalu ananda kenang sepanjang masa.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, MBA. selaku rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, Sp,M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
4. Bapak Nasrullah Djamil, SE. Msi. Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 yang telah banyak memotivasi, memberi kritik, arahan, saran, dan meluangkan waktunya. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
5. Bapak Khairil Henry SE. Msi. Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memotivasi, memberi kritik, arahan, saran, dan meluangkan waktunya untuk mendidik dan membimbing penulis sampai skripsi ini selesai. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. Ibu Susnaningsih M. SE, MM. selaku Penasehat Akademis yang telah memotivasi dari awal kuliah sampai sekarang.
7. Para Dosen dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Buat Saudaraku, Kakanda Agus Maindro dan Adinda Afri Hendra yang telah banyak membantu, memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semangat dan bantuan kalian sangat berarti bagi penulis. Dan buat seseorang yang jauh disana calon pendamping hidup penulis yang slalu memberikan motivasi dan slalu sabar dalam menghadapi semua tingkah laku penulis.
9. Buat sahabat penulis Susanti, Resti Neri SE yang selalu bersama dalam suka maupun duka, Terimakasih atas Pengertian dan kestiannya untuk sekarang dan

selamanya. Kebersamaan kita selama ini tidak tergantikan oleh apapun dan tidak akan penulis lupakan, karena persahabatan lebih dari segalanya. Buat keuarga besar Karya Baru Ises, Ikis, dan Ega yang telah memberikan motivasi yang tidak akan pernah penulis lupakan. Buat sahabat-sahabat KUKERTA penulis, bang Rahmat, Iir, Dedi, Tulang, Dwie', Santi, Riza, Fitri dan Rubiyah.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan di Akuntansi lokal C, Konsentrasi Perpajakan, dan Konsentrasi lainnya. Terimakasih atas sokongan dan kerjasamanya, perjalanan selama empat tahun tidak akan dapat penulis lupakan.

11. Buat sahabat baik yang berada di Perumahan Panam Harmoni Blok B4 Yulhaini, Asmaini, Dwi Nopria Ningsih, Asma Wahyu, Reni Wisna, Lili Marselina, Rahma Liza Dan Dinda Ella Meiteti dan sahabat yang lain yang tak mungkin dibuat satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semangat dan bantuan kalian sangat berarti bagi penulis..

Hanya kepada Allah SWT penulis memohon, sehingga segala usaha dan jasa semua pihak dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis berhadap semoga pembaca dapat memberikan kritikan dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga ada manfaatnya.

Pekanbaru, 19 Juni 2012

Penulis

SUSI SUSANA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II : TELAAH PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pajak.....	10
2.1.1 Jenis Pajak	11
2.1.2 Fungsi Pajak	12
2.1.3 Asas-asas pemungutan Pajak	13
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	14
2.1.5 Cara Pemungutan Pajak	16
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	18
2.2.1 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	18
2.2.2 Klasifikasi Bumi dan Bangunan	20
2.2.3 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	20
2.2.4 Dasar hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	21
2.2.5 Tarif Pajak	22
2.3 Pengertian Partisipasi.....	22
2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat	25

2.5 Pajak Dalam Pandangan Islam.....	33
2.6 Pengembangan hipotesis penelitian	34

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Sifat Penelitian	39
3.2 Jenis Data	39
3.3 Populasi dan Sampel	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5 Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel.....	42
3.5.1 Variabel Dependen	43
3.5.2 Variabel Independen	43
3.6 Metode Analisis Data.....	46
3.6.1 Uji Kualitas Data	47
1. Uji Validitas	47
2. Uji Realibilitas.....	47
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	47
1. Uji Normalitas Data.....	47
2. Uji Multikolinieritas.....	48
3. Uji Heterokedastistas (Uji Park).....	48
4. Uji Autokorelasi	49
3.6.3 Uji Hipotesis	49
1. Metode Regresi Linear Berganda.....	49
2. Uji T (T-test)	50
3. Uji F (Simultan).....	51
4. Koefisien Determinasi	51
3.7 Model Hipotesis	52
3.8 Hipotesis Penelitian.....	53
3.9 Variabel Penelitian.....	53

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Identitas Responden	54
-------------------------------	----

4.2 Pengujian Kualitas Data.....	59
4.2.1 Hasil Uji Validitas Variabel Instrumen.....	59
1. Validitas Variabel Kesadaran	59
2. Validitas Variabel Pendidikan.....	60
3. Validitas Variabel Pelayanan Jasa.....	60
4. Validitas Variabel Pendapatan	61
5. Validitas Variabel Sanksi	61
6. Validitas Variabel Partisipasi	62
4.2.2 Hasil Rekapitulasi Uji Reliabilitas Variabel Instumen	62
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	63
4.3.1 Uji Normalitas.....	63
4.3.2 Uji Multikolinearitas	64
4.3.3 Uji Autokorelasi.....	66
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	67
4.5 Uji Hipotesis	68
4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda	68
4.5.2 Pengujian Variabel Secara Parsial (T).....	70
4.5.3 Uji Pengujian Variabel Secara Simultan (F).....	75
4.5.4 Koefisien Determinasi R^2	76
4.6 Pembahasan.....	77

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan	82
5.2 Keterbatasan.....	84
5.3 Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I .1 Realisasi Penerimaan Pajak BBB	3
Tabel IV. 1 Hasil Distribusi Kuesioner.....	54
Tabel IV. 2 Profil Responden (N=100).....	55
Tabel IV. 3 Statistik Deskriptif Responden	57
Tabel IV. 4 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Kesadaran.....	59
Tabel IV. 5 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Pendidikan.....	60
Tabel IV. 6 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Pelayanan Jasa	60
Tabel IV. 7 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Pendapatan	61
Tabel IV. 8 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Sanksi	61
Tabel IV. 9 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Partisipasi	62
Tabel IV. 10 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas.....	62
Tabel IV. 11 Uji Normalitas Data	64
Tabel IV. 12 Hasil Uji Multikolinearitas	65
Tabel IV. 13 Hasil Uji Autokorelasi	66
Tabel IV. 14 Hasil Uji heteroskedastistas	67
Tabel IV. 15 Hasil Analisis Regresi Uji Linear Berganda.....	68
Tabel IV. 16 Hasil Pengujian Hipotesis T	71
Tabel IV. 17 Hasil Pengujian Hipotesis F.....	75
Tabel IV. 18 Hasil Koefisien Determinasi R ²	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar III .1 Model Penelitian	52
Gambar IV. 1 Hasil Scatterplot Heteroskedastistas	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara baru berkembang (peralihan) di dunia. Hal ini bisa dilihat dari beberapa sisi, diantaranya pembangunan. Pembangunan ini bisa berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Dimana setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari dana yang dimiliki oleh suatu negara ataupun daerah.

Pembangunan disini juga bisa diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh negara (Bangsa) untuk tumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana yang ditempuh oleh suatu negara dalam semua segi kehidupan negara dalam rangka mencapai tujuan akhir (Sondang,2005:5)

Pajak Bumi dan bangunan adalah sumber pendapatan negara yang mempunyai peranan yang sangat penting didalam pelaksanaan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pendapatan negara yang potensial, dibayar oleh masyarakat dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Upaya pemerintah untuk mendapatkan sektor pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang strategis semakin tampak setelah dikeluarkan UU No.9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU No. 10 tahun 1994 tentang pajak penghasilan UU No. 11 Tahun 1994 tentang PPh dan penjualan atas barang mewah dan sekaligus UU No. 12 tahun 1994

tentang pajak bumi dan bangunan. Serta di adakanya penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak, akan tetapi penyuluhan tersebut hanya terbatas pada pelaksanaan perpajakan saja, sehingga masalah tingkat partisipasi untuk membayar pajak perlu diadakan pengkajian lebih lanjut.

Pada dasarnya faktor yang menghambat pembayar pajak adalah masalah kesadaran sehingga kurangnya partisipasi masyarakat, di mana perlu di beri pengarahannya bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pembangunan. Berdasarkan kenyataan sekarang ini, bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mata pencahariannya adalah petani, pedagang, pelayan dan ada sebagian PNS, tapi partisipasi mereka dalam membayar Pajak masih kurang. Maka dana yang terhimpun dari peran serta masyarakat melalui Pajak akan mengalami banyak kendala yaitu pembayaran pajak yang tidak tepat waktu atau menunggak sehingga pelaksanaan pembangunan akan terlambat atau tidak lancar.

Selain itu juga masalah pendidikan rakyat sangat penting karena dengan adanya pengetahuan maka akan menyadarkan masyarakat bahwa berpartisipasi dalam membayar pajak sangat membantu pembangunan. Dalam hal ini pendidikan masyarakat yang belum maju atau masih terbelakang akibatnya pandangan mengenai hakekat dan arti pembayaran pajak serta kesadaran dalam melaksanakan kewajiban dan mengalami kesulitan, sehingga menyebabkan program pembangunan akan mengalami hambatan. Pendidikan merupakan fenomena asasi dalam kehidupan manusia dengan kehidupan manusia dapat

mencapai pada taraf yang tinggi baik bidang ekonomi, sosial, kultural ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kesusilaan.

Dalam konteks demikian pendidikan sebagai faktor pembangunan, baik dalam proses maupun pembudidayaan hasilnya. Hal ini secara merata terlihat dari partisipasi masyarakat melalui pembayaran pajak terutama pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu diharapkan setiap masyarakat memiliki kesadaran berpartisipasi yang tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya partisipasi seseorang dalam memenuhi kewajiban sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kesadaran, pendidikan, pendapatan dan kurangnya pelayanan jasa di kantor pelayanan pajak. Tinggi rendahnya kesadaran, pendidikan dan pendapatan seseorang akan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban, penalaran, sikap maupun perilakunya.

Tabel I.1

**Realisasi penerimaan PBB sektor Perkotaan dan Perdesaan Kecamatan
Kuantan Tengah per 30 oktober 2011.**

No	Nama Desa / Kelurahan	Target (Rp)	Jmlh SPP T (w.p)	Realisasi per 30 Oktober		Persenta se (%)
				Dalam Rupiah	STTS	
1	2	3	4	5	6	7
A.	PBB Perkotaan					
1.	K. Sentajo	12,156,713	565	3,377,027	145	27.78
2.	Koto Sentajo	13,398,017	396	9,565,177	271	71.39
3.	M. Sentajo	14,628,569	727	78,782	7	0.54
4.	Pulau komang	5,558,743	357	144,301	5	2.60

5.	Kmpng Sawah	25,866,586	653	1,195,001	21	4.62
6.	Pasar Taluk	42,910,826	460	20,041,700	160	46.71
7.	Koto taluk	39,983,767	1049	7,726,060	173	19.32
8.	Simpang Tiga	48,799,514	707	10,012,486	92	22.86
9.	Pl. Godang	8,656,364	607	2,027,580	138	23.42
10.	Koto Kari	3,021,617	223	275,574	22	9.12
11.	Pintu Gobang	10,730,617	820	251,783	6	2.35
12.	Jake	179,616,117	2142	73,379,952	374	40.85
13.	Sungai Jering	220,639,874	1434	88,064,832	624	39.91
14.	Beringin Taluk	14,697,675	614	5,033,417	173	33.63
JUMLAH (A)		<u>635,934,999</u>	<u>10754</u>	<u>221,173,624</u>	<u>2211</u>	<u>34.78</u>
B	PBB pedesaan					
1.	Bandar Alai	2,316,492	289	0	0	0.00
2.	Pl. Kedundung	11,354,076	671	538,089	5	4.74
3.	Pl. Aro	8,594,454	790	4,305,207	368	50.09
4.	Seberang Taluk	21,167,088	1273	1,079,920	85	5.10
5.	Pl. Baru	3,161,108	327	3,161,108	327	100.00
6.	Koto Tuo	2,071,834	173	0	0	0.00
7.	Kopah	2,225,578	160	0	0	0.00
8.	Jaya	10,245,040	945	0	0	0.00
9.	Munsalo	4,039,558	407	1,308,364	139	32.39
10.	Pl. Kopung	5,624,972	369	0	0	0.00
11.	Sitorajo	8,920,962	435	1,501,866	74	16.84
12.	Sb. Taluk Hilir	4,691,237	619	2,382,573	330	50.79
JUMLAH (B)		<u>84,412,399</u>	<u>6458</u>	<u>14,277,127</u>	<u>1328</u>	<u>16.91</u>
JUMLAH TOTAL (A+B)		<u>720,347,398</u>	<u>17212</u>	<u>235,450,751</u>	<u>3539</u>	<u>51.69</u>

Sumber data : kantor Camat Kuantan Tengah

Dari data dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan terjadi ketidak stabilan dalam penerimaan pajak, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak PBB masih kurang ini juga terlihat dari banyaknya 17.212 jiwa wajib pajak dan hanya terealisasi sampai tanggal 30 Oktober adalah 3.539 jiwa.

Pencapaian target bukan hanya tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga tugas masyarakat setempat, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah juga harus bisa menciptakan suatu kondisi dimana Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu beban, akan tetapi suatu kewajiban yang harus dibayar untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini partisipasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan perlu adanya peningkatan baik dalam tingkat Partisipasi masyarakat, dimulai dari meningkatkan Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan, Sanksi serta prosedur perpajakan terus di sempurnakan dan aparatur perpajakan makin di arahkan agar dapat mendorong pendayagunaan dan pengembangan daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor Yang Mempegaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan singingi.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangaunan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangaunan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Apakah Pelayanan Jasa berpengaruh terhadap Partisipaasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangaunan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Apakah Pendapatan berpengaruh terhadap Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangaunan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Apakah Sanksi berpengaruh terhadap Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangaunan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dimana berbagai data dan informasi dikumpulkan, dalam rangka membantu memecahkan suatu masalah yang dihadapi. maka penulis menentukan tujuan penelitian menjadi dua yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui kebijakan apa yang diambil aparat pemungut pajak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Manfaat penelitaian

1. Bagi Peneliti, Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan serta menambah ilmu yang berharga dalam menganalisa dan memecahkan masalah dengan ilmu yang diperoleh diperguruan tinggi.
2. Bagi Instansi, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi Kantor Kecamatan dalam meningkatkann partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kuantan Singingi pada masa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami uraian yang ada pada proposal ini, Secara ringkas dapat dijelaskan sistematika penulisannya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisikan pendahuluan dimana dikemukakan hal-hal yang mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bagian ini penulis mengemukakan berbagai teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti pengertian Partisipasi Masyarakat, Pengertian Pajak, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, Objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan lainnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menguraikan mengenai metodologi penelitian berupa jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat identitas responden dan hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH dalam bukunya dasar-dasar hukum pajak Dan pajak pendapatan (2007:1) menyatakan “Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.”

Menurut Prof. Dr. Adriani :

“Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung”.

Pengertian pajak menurut P.J.A Andriani (dalam buku bohari 2008:23) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib pajak pembayarannya menurut peraturan-peraturan dan tidak dapat prestasi yang dapat ditunjuk yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.

Dengan melihat definisi yang dikemukakan parah ahli diatas maka unsur-unsur yang terdapat dalam defenisi tersebut adalah :

- a. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal

balik (kontraprestasi), yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.

- b. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib pajak pembayarannya menurut peraturan-peraturan dan tidak dapat prestasi yang dapat ditunjuk yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.
- c. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dapat dipaksakan atau ditangih secara paksa oleh aparat yang berwenang.
- d. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh yang terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2.1.1. Jenis Pajak

Pajak daerah di bagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Pajak Propinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
 - c. Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

1. Pajak kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan
 - j. Pajak lain-lain.(Mardiasmo, 2009 : 13)

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai fungsi, yaitu :

1. Berfungsi sebagai Budgetair

Fungsi yang paling utama pajak yaitu dimana pajak digunakan sebagai alat atau sumber dalam meningkatkan pendapatan atau dana secara optimal ke kas negara, karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Berfungsi sebagai Regulerend (mengatur).

Disebut juga sebagai mengatur adalah salah satu fungsi pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau instrumen guna mencapai tujuan yang diinginkan, atau tujuan lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak. Fungsi ini merupakan fungsi tambahan dikarenakan hal ini sebagai pelengkap dari fungsi pajak lain. Untuk mencapai tujuan tertentu, maka fungsi kedua ini diterapkan untuk mengatur sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

2.1.3. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas *principle* adalah suatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan Pajak.

W.J de Langen seorang ahli pajak kebangsaan belanda (dalam Bohari, 2008 : 42) menyebutkan 7 (tujuh) asas pokok perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. *Asas kesamaan*, dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya di kenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.
- b. *Asas daya pikul*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya rendah dan dibawah dibebaskan dari pajak.

- c. *Asas keuntungan istimewa*, bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak yang istimewa pula.
- d. *Asas manfaat*, mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang di sediakan oleh pemerintah.
- e. *Asas kesejahteraan*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada suatu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintahan tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. *Asas keringanan beban*, asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan berapapun tingginya kesadaran berwarga negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya.
- g. *Asas keseimbangan*, asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu di usahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu pelaksanaan hukum dan kepastian hukum.

2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi keadilan negara maupun warganya, jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5.Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Nyata (Riel Stesel)

Pemungutan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan nyata), pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Stesel Anggapan (Fictieve Stesel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama tahun yang sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

Stesel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan , kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.1.6.Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2010 : 17) ada tiga macam sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu :

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri *Official Assesment Sistem* adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak daerah terutang ada pada wajib pajak (wajib pajak yang aktif).
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (fiskus pasif).

Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas untuk memberikan penyuluhan penerangan, pengawasan maupun sebagai verivikator.

3. *With Holding System*

With Holding System suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2010:325), Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang dikenakan atas objek pajak berupa bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan juga merupakan pajak yang dikenakan karena kepemilikan, pengusaha, dan manfaat atas bumi dan bangunan.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, Perairan) serta laut diwilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan.

2.2.1. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 1994, Yang menjadi objek pajak adalah Bumi dan bangunan. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan. Dan yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas

bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut.
- b. Jalan Tol
- c. Kolam Renang
- d. Pagar Mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Fasilitas yang lain yang memberikan manfaat.

b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam PBB yang menjadi subjek Pajak menurut Undang-undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994 adalah orang atau badan yang (Markus, 2005:408) :

- a. Mempunyai hak atas Bumi dan/atau
- b. Memperoleh mamfaat atas Bumi dan/atau
- c. Memiliki atau menguasai Bangunan dan/atau
- d. Memperoleh manfaat atas Bangunan.

2.2.2. Klasifikasi Bumi dan Bangunan

Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Letak.
- b. Peruntukan.
- c. Pemanfaatan.
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan Klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Bahan yang digunakan.
- b. Rekayasa.
- c. Letak .
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

2.2.3. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh kepala kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan asas self assesment. Self assesment adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase

tertentu dari nilai jual yang sebenarnya. Namun ada beberapa daerah tertentu karena pembangunan menyebabkan kenaikan NJOP cukup besar, maka nilai jual di tetapkan setahun sekali.

2.2.4. Dasar hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a. UU No.12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah di ubah menjadi UU No.12 Tahun 1994.
- b. Keputusan Menteri Keuangan No 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2002 tentang penepatan besarnya nilai jual kena pajak untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Keputusan Menteri Keuangan No.552/KMK.03/2002 tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan No.82/KMK.04/2002 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
- e. Keputusan Menteri keuangan No.1002/KMK.04/1985 tentang tata cara penagihan PBB dan penunjukan Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
- f. Keputusan Menteri keuangan No.1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/ Walikota Madya Kepala Daerah tingkat II.

- g. Keputusan Menteri keuangan No.523/KMK.04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- h. UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

2.2.5. Tarif Pajak

Pajak yang di pungut pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) sudah sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan tarif. Tarif Pajak merupakan suatu ukuran yang standar dari suatu pemungutan Pajak yang dapat mempergunakan Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perhitungan proporsi (persentase) atau bersifat tetap.

Tarif Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 0,5%. Dan besarnya pajak terutang dihitung dengan cara Sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Bumi dan Bangunan} &= \text{Tarif pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times (\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP}-\text{NOJPTKP})) \end{aligned}$$

2.3 Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah peran serta dalam membangun dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam menyusun program pembangunan ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut sertanya memanfaatkan hasil pembangunan yang nyata.

Menurut Seligman dalam Muhamad Al Amin (2003:9) menyatakan bahwa pengertian partisipasi ikut sertanya suatu kesatuan dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar. Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa partisipasi itu slalu dominan bahkan tidak dapat dipisahkan dalam segala kehidupan masyarakat.

Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta mengikuti pemerintah karena pemerintah merupakan perancang, penyelenggara dari pembangunan. Masyarakat hanya diharapkan ikut serta, karena yang dilakukan pemerintah juga bermaksud untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Untuk lebih rincinya dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga dirumuskan oleh parah ahli lainnya seperti Raharjo dalam A. Sanit mengemukakan partisipasi diartikan dana dan daya yang disediakan sebagai proyek-proyek pemerintah.

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu responden dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan. Adapun faktor-faktor lain yang sangat erat kaitanya dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak hal ini menurut Pangaeban dalam Yeni Apryana adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat pendidikan
- b. Tingkat pendapatan
- c. Jarak tempat tinggal
- d. Sikap

e. Penyuluhan

Partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. (Loekman Sutrisno 2007 : 207)

Beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat partisipasi pembangunan yaitu sosial ekonomi yang meliputi :

- a. Faktor pendidikan
- b. Faktor pekerjaan dan
- c. Pendapatan.

Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.(www.partisipasi)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

- a. Usia
- b. Jenis kelamin
- c. Pendidikan
- d. Pekerjaan dan penghasilan
- e. Lamanya tinggal
- f. Kesadaran

Menurut Syahyiti (dalam Miftah 2000 : 145) partisipasi adalah tumbuhnya kesadaran terhadap kesalinghubungan antara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dalam

komunitas dengan mengambil kebijakan dan lembaga jasa lain. Partisipasi juga dapat di defenisikan sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan, maju tidaknya suatu negara juga tergantung dari besar kecilnya partisipasi yang diberikan oleh masyarakat.

Disamping itu, adanya partisipasi masyarakat di sertakan pada pertimbangan bahwa kedaulatan ada di tangan masyarakat dengan melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk masa berikutnya.

2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

1. Kesadaran

Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu tindakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Menurut Feira “ Kesadaran merupakan kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi terhadap kenyataan”. Sedangkan menurut Padila dan Prior “ Kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukanya suatu tindakan”.

Pada hakikatnya kesadaran membayar pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam keadaan tahu, mengerti dan tidak merasa dipaksa

ataupun takut dalam melaksanakan kewajibannya, karena adanya nilai-nilai hukum dalam diri wajib pajak dan adanya pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

Safri Nurmantu (2010:103) menyatakan bahwa:

“Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar”.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Irianto (2005:36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya :

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar

pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib Pajak adalah suatu sikap menyadari dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Pendidikan

Pada dasarnya pendidikan adalah perbuatan mendidik, sedangkan mendidik itu sendiri berarti membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dengan sengaja agar menjadi seseorang yang dewasa, bertingkah laku baik dan berbudi pekerti yang luhur sehingga timbul kesadarannya guna berbakti kepada orang tua, bangsa dan tanah air.

Pendidikan berasal dari bahasa *paedagogire*, yang berarti membimbing anak, agar anak menjadi dan berbuat sebagai mana mestinya. Karena pada dasarnya pendidikan adalah suatu usaha mewariskan suatu kebudayaan atau warisan sosial kepada generasi berikutnya, sehingga pendidikan merupakan suatu cara melangsungkan kehidupan bagi bangsa dan Negara. John Dewey memberikan definisi pendidikan adalah sebagai proses pembentukan

kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional secara alami antara sesama individu. Menurut Ki Hajar Dewantoro pendidikan adalah “sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan bathin, karakter), pikiran (intektual) dan jasmani”

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperluakn dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan”.

Jadi pengertian pendidikan dapat diartikan sebagai perubahan baik sikap dan tingkah laku serta pengetahuan dan pendewasaan individu dalam berfikir, berpandangan dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Dalam hal ini tingkat pengetahuan mengenai hakeket dan arti dari pembayaran pajak bumi dan bangunan akan dapat dipahami dan pelaksanaanya dapat lancar dengan baik. Pendidikan bukan hanya sekolah saja melainkan pembentukan konsep tingkah laku dan pola kehidupan masyarakat. Karena orang dalam pergaulan hidupnya selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya, jadi proses pendidikan dan pengaruhyanya penting sekali artinya bagi perkembangan seseorang.

Pendidikan jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang berjenjang. Jenjang pendidikan merupakan pengertian tahapan pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasar tingkat perkembangan peserta didik, keluasan dan kedalaman bahan pengajaran dan cara penyajian. Berdasarkan UU RI No. 20/2003 mengenai jenjang pendidikan dijelaskan: “Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi”.

Bahwasanya setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang yang sadar pasti mempunyai tujuan. Pada dasarnya pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan tujuan masyarakat adil dan makmur.

3. Pelayanan Jasa

Pelayanan adalah suatu proses kepada orang lain dengan cara tertentu memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan(Boediono,2009:11)

Jasa adalah aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual, misalnya jasa pengacara, bengkel, biro dll(Tjiptono,2003:6)

Jasa atau Pelayanan adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberi nilai tambah seperti kenikmatan, hiburan, santai, dan sehat bersifat tidak berwujud (Alma,2002:6)

Tingkat pelayanan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor yang merangsang wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, apabila wajib pajak mempunyai dasar atau pengalaman dalam membayar pajak dengan pelayanan yang baik, mudah dan aman, maka tingkat partisipasi dapat di pertahankan.

Sebaliknya apabila pembayaran pajak tersebut banyak kendala maka wajib pajak akan merasa enggan untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

4. Pendapatan

Beberapa pengertian tentang pendapatan, diantaranya seperti yang dijelaskan dibawah ini.

Menurut Donal E. Kieso & Jerry J. Weygant yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dalam buku Akuntansi Intermediate (2010)

Pendapatan adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban dari penyebaran atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan selama satu periode.

Menurut SAK No.23 tentang defenisi pendapatan

Pendapatan adalah suatu arus masuk aset atau penyelesaian kewajiban dari penyebaran atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan selama satu periode.

Sedangkan menurut *Accuonting principle Board* dikutip oleh Theodorus Tuanakotta dalam buku teori Akuntansi pengertian pendapatan adalah

pendapatan sebagai inflow of asset dalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa.

5. Sanksi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan per Undang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dengan dua macam sanksi (Mardiasmo, 2008 : 57), yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang di ancam dengan sanksi administrasi saja, akan tetapi ada juga yang diancam dengan sanksi pidana saja, akan tetapi ada juga yang di ancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Pidana

Ketentuan sanksi pidana yaitu menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga sanksi, yaitu : denda pidana, kurungan dan penjara.

a. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Di denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada sipelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanyaketentuan mengenai sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya.

Ketentuan mengenai sanksi pidana diatur atau ditetapkan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telaah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.

3. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan meliputi kondisi :

- a. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP (surat pemberitahuan objek pajak) walaupun sudah ditegur secara tertulis, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- b. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau kerugian lain ternyata hutang pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang

tersebut ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak yang dihitung.

- c. Wajib pajak membayar atau tidak membayar. Pajak yang terhutang pada saat pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung pada saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

2.5 Pajak Dalam Pandangan Islam

Pajak dalam pandangan Islam sebagai mana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah Ayat 29.



29. *perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benars (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada*

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Pajak dalam Islam disebut jizyah yaitu pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan mereka. Jizyah pungutannya dapat dipaksakan dimana dalam ayat diatas boleh diperangi bagi yang tidak mau membayar jizyah. Sebagaimana pajak dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku, jika pajak dipungut menurut secara islam bagi yang enggan mrmbayar pajak dapat di tangih secara paksa, sita dan bahkan boleh di perangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap aturan yang telah dikeluarkan.

2.6 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian serta di hubungkan dengan teori-teori yang relevan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Kesadaran

Pada hakikatnya kesadaran membayar pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam keadaan tahu, mengerti dan tidak merasa dipaksa ataupun takut dalam melaksanakan kewajibannya, karena adanya nilai-nilai

hukum dalam diri wajib pajak dan adanya pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

Safri Nurmantu (2010:103) menyatakan bahwa:

“Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar”.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib Pajak adalah suatu sikap menyadari dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara untuk mensejahterakan masyarakat.

H1 : Diduga Kesadaran mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak.

2. Pendidikan

Pada dasarnya pendidikan adalah perbuatan mendidik, sedangkan mendidik itu sendiri berarti membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dengan sengaja agar menjadi seseorang yang dewasa, bertingkah

laku baik dan berbudi pekerti yang luhur sehingga timbul kesadarannya guna berbakti kepada orang tua, bangsa dan tanah air.

Menurut Ki Hajar Dewantoro pendidikan adalah “sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan bathin, karakter), pikiran (intektual) dan jasmani”

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperluakn dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Jadi pengertian pendidikan dapat diartikan sebagai perubahan baik sikap dan tingkah laku serta pengetahuan dan pendewasaan individu dalam berfikir, berpandangan dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Dalam hal ini tingkat pengetahuan mengenai hakeket dan arti dari pembayaran pajak bumi dan bangunan akan dapat dipahami dan pelaksanaanya dapat lancar dengan baik. Pendidikan bukan hanya sekolah saja melainkan pembentukan konsep tingkah laku dan pola kehidupan masyarakat. Karena orang dalam pergaulan hidupnya selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya, jadi proses pendidikan dan pengaruhyanya penting sekali artinya bagi perkembangan seseorang.

H2 : Diduga pendidikan mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak.

2. Pelayanan Jasa

Tingkat pelayanan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor yang merangsang wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, apabila wajib pajak mempunyai dasar atau pengalaman dalam membayar pajak dengan pelayanan yang baik, mudah dan aman, maka tingkat partisipasi dapat di pertahankan.

Sebaliknya apabila pembayaran pajak tersebut banyak kendala maka wajib pajak akan merasa enggan untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

H3 : Diduga Pelayanan Jasa mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak.

3. Pendapatan

Beberapa pengertian tentang pendapatan, diantaranya seperti yang dijelaskan dibawah ini.

Menurut SAK No.23 tentang defenisi pendapatan

Pendapatan adalah suatu arus masuk aset atau penyelesaian kewajiban dari penyebaran atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupaka operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan selama satu periode.

Sedangkan menurut *Accuonting principle Board* dikutip oleh Theodorus Tuanakotta dalam buku teori Akuntansi pengertian pendapatan adalah pendapatan sebagai inflow af asset dalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa.

H4 : Diduga Pendapatan mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak.

4. Sanksi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan per Undang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preveatif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dengan dua macam sanksi (Mardiasmo, 2008 : 57), yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang di ancam dengan sanksi administrasi saja, akan tetapi ada juga yang diancam dengan sanksi pidana saja, akan tetapi ada juga yang di ancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

H5 : Diduga Sanksi mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kausal perdandungan melalui survey, dimana penelitian langsung kelapangan untuk mengumpulkan data, survey ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang diantar langsung kedesa-desa yang berada di kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singigi. Dan pengambilan data diambil di Kantor Camat Kuantan Tengah, adapun alasan dipilihnya organisasi ini merupakan Organisasi yang terdapatnya catatan seluruh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kuantan Tengah, sedangkan penelitian ini di lakukan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Jenis Data

1. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan dari pihak ketiga dengan cara menyebarkan kuesioner dan wawancara langsung kepada responden yang terpilih yang bertempat tinggal di lingkungan Kecamatan Kuantan Tengah.

2. Data Skunder

Data yang di dapatkan dari pihak ketiga tidak secara langsung dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian ini,

melalui studi pustaka, peraturan perundang-undangan, dan buku yang relevan serta literatur lainnya.

3.3 Populasi dan Sampel Data

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2003:73) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat (wajib pajak) / jumlah kepala keluarga yang berdomisili di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 17.212 orang.

2. Sampel

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah populasi yang relatif cukup banyak, maka untuk memerlukan data yang dibutuhkan, diambil beberapa sampel dari setiap unsur populasi yang dirasa memungkinkan untuk mewakili setiap kelompok. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu Dengan menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel diambil dari sebagian jumlah populasi yang di nilai dengan mewakili kesekuruhan responden penelitian (Sugiyono,2007: 96).

Dalam penelitian ini untuk Penerikan sampel peneliti menggunakan rumus Slovin (Umar, 2008) dalam yaitu :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Taraf kesalahan yang ditoleransi dalam sampel (10 %)

Adapun jumlah populasi atau wajib pajak PBB sekecamatan Kuantan Tengah dari penelitian ini sebesar 17.212 jiwa , maka dengan besar jumlah tersebut dan demi menghemat biaya, tenaga dan waktu maka penulis mengambil sampel dengan taraf kesalahan 10% (0,1) dari populasi yang berjumlah 17.212 jiwa terdapat sampel sebanyak :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{17.212}{1+17.212 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{17.212}{1+17.212 \times (0,01)}$$

$$n = \frac{17.212}{1+172,12}$$

$$n = \frac{17.212}{173,12}$$

$$n = 99,42$$

$$n = 100$$

Jadi, dapat dikatakan bahwa jumlah sampel dari 17.212 jiwa adalah sebanyak 100 jiwa wajib pajak yang berdomisili Di Kecamatan Kuantan Tengah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung kelapangan terhadap objek penelitian yang ada dalam rangka untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan dan terpimpin terhadap responden yang dianggap perlu dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan.
3. Angket/Kuesioner, adalah suatu aktivitas pengumpulan data dengan menyebarkan angket berupa suatu daftar pertanyaan tertulis kepada responden terpilih untuk diisi dengan alternatif dengan pertanyaan yang telah disediakan.

3.5 Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel adalah suatu yang dapat membedakan nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek yang sama. Konsep dapat diubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri.

Data penelitian terdiri atas data primer yang dikumpulkan melalui kuensioner. Yang menjadi variabel dependen adalah partisipasi (Y) dan variabel Independennya adalah kesadaran (X1), pendidikan (X2), pelayanan jasa (X3), pendapatan (X4), dan sanksi (X5).

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

1. Partisipasi

Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta mengikuti pemerintah karena pemerintah merupakan perancang, penyelenggara dari pembangunan. Masyarakat hanya diharapkan ikut serta, karena yang dilakukan pemerintah juga bermaksud untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Pertanyaan pada kuesioner partisipasi bersumber dari Yeni Apriana.

Untuk mengukur seberapa besar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

3.5.2 Variabel Independen (X)

1. Kesadaran (X1)

Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu tindakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sedangkan menurut Padilla dan Prior “ Kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukannya suatu tindakan”. Pertanyaan pada kuesioner variabel kesadaran bersumber dari Merri Nugraheni.

Untuk mengukur seberapa besar kesadaran (X1) mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel ini

menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

2. Pendidikan (X2)

Pendidikan berasal dari bahasa *paedagogire*, yang berarti membimbing anak, agar anak menjadi dan berbuat sebagai mana mestinya. Karena pada dasarnya pendidikan adalah suatu usaha mewariskan suatu kebudayaan atau warisan sosial kepada generasi berikutnya, sehingga pendidikan merupakan suatu cara melangsungkan kehidupan bagi bangsa dan Negara. Menurut Ki Hajar Dewantoro pendidikan adalah “sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan bathin, karakter), pikiran (intektual) dan jasmani”. Pertanyaan pada kuesioner variabel pendidikan ini bersumber dari peneliti yang dibantu oleh pembimbing dan disebarkan kepada teman-teman sebelum digunakan, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pertanyaan ini layak untuk digunakan atau tidak. Setelah hasilnya valid baru digunakan dan disebarkan untuk kuesioner penelitian.

Untuk mengukur seberapa besar Pendidikan (X2) mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

3. Pelayanan Jasa (X3)

Jasa atau Pelayanan adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberi nilai tambah seperti kenikmatan, hiburan, santai, dan sehat bersifat tidak berwujud.

Tingkat pelayanan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor yang merangsang wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, apabila wajib pajak mempunyai dasar atau pengalaman dalam membayar pajak dengan pelayanan yang baik, mudah dan aman, maka tingkat partisipasi dapat di pertahankan. Pertanyaan pada kuesioner variabel pelayanan jasa bersumber dari Merri Nugraheni

Untuk mengukur seberapa besar pelayanan jasa (X3) mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

4. Pendapatan (X4)

Pendapatan adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban dari penyebaran atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan selama satu periode. Pertanyaan pada kuesioner pendapatan bersumber dari Merri Nugraheni.

Untuk mengukur seberapa besar pendapatan (X4) mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

5. Sanksi (X5)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan per Undang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pertanyaan pada kuesioner sanksi bersumber dari Yeni Apriana.

Untuk mengukur seberapa besar Sanksi (X5) mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS (Statistical Package For Social Science). Ada beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Pengujian ini menggunakan teknik corrected item total correlation yaitu dengan cara mengoreksi skor tiap item dengan totalnya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid suatu variabel, dilakukan dengan menggunakan teknik validity analysis dengan nilai korelasi diatas 0.30 (Sekaran,2000:169).

2. Uji Realibilitas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila diukur dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Imam Ghazali,2004:42).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Model regresi akan menghasilkan estimator tidak bias yang baik jika memenuhi asumsi klasik yaitu bebas dari *Multikolinearitas*, *Heteroskedastisitas*, *Autokorelasi* dan memenuhi asumsi Normalitas (Priyatno : 2010).

1. Uji Normalitas Data

Menurut Ghazali (2006:110-115) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik lainnya dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji non

parametrik *kolmogorov smirnov*, Jika $P\text{value}/\text{sig.}(2\text{-teiled}) > 0.05$ berarti data terdistribusi dengan normal dan sebaliknya.

2. Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi Klasik Multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Menurut Santoso dalam Duwi (2009) pada umumnya jika Varians Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 atau nilai tolerance besar atau sama dengan 0,10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya dan begitu juga sebaliknya.

3. Uji Heterokedastistik (Uji Park)

Uji heterokedastistik bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variace dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variace dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastistas dan jika berbeda disebut heteroskedastistas. (Iman Ghozali, 2006:105)

Diagnosa adanya heteroskedastistas di deteksi dengan beberapa cara, bisa dilihat dengan melihat grafik scatterplot dengan menggunakan aplikasi SPSS. Apabila titik-titik data yang ada pada grafik menyebar, maka tidak terdapat heterokedastistas. Dan sebaliknya, jika titik data tersebut membentuk pola tertentu, maka terdapat pola herekedastistas.

4. Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (error) pada periode t-1. Jika ada, berarti terdapat autokorelasi dan model regresi dikatakan baik bila terbebas dari auto korelasi.

Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari masalah autokorelasi. Menurut Singgih Santoso secara umum deteksi adanya korelasi biasa difokuskan pada uji Durbin-Watson sebagai berikut ;

1. Jika D-W dibawah -2 berarti ada Autokorelasi Positif
2. Jika D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada Autokorelasi
3. Jika D-W dibawah +2 berarti ada Autokorelasi Negatif

3.6.3 Uji Hipotesis

1. Metode Regresi Linear Berganda

Adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih dari variabel independen ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah hubungan antara variabel independen atau dependen berhubungan positif atau negatif.

Dengan persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Terikat (Partisipasi Wajib Pajak).

X_1, X_2, \dots, X_n = Variabel Bebas I, II, III, IV, V (Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan, Sanksi).

a = Konstanta

b_1, b_2, \dots, b_n = Koefisien Regresi

e = Galat (error)

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau simultan (Uji F) dan secara parsial (Uji t) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

2. Uji T (t-test)

Uji ini dilakukan secara terpisah-pisah untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Uji T dilakukan untuk membandingkan t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikan 5% (0,05). Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel bebas dapat menerangkan terikatnya. Artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

- a. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau p value $> \alpha$ dikatakan tidak signifikan, dan Hipotesis penelitian ditolak.
- b. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ dikatakan tidak signifikan, dan hipotesis diterima.

Kategori yang digunakan berdasarkan skala likers, dimana responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nilai jawaban sebagai berikut :

1. Alternatif SS (Sangat Setuju 5)
2. Alternatif S (Setuju 4)
3. Alternatif N (Netral 3)

4. Alternatif KS (Kurang Setuju 2)

5. Alternatif TS (Tidak Setuju 1).

3. Uji F (Simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). (Dwi Priyanto, 2009 : 81)

Uji F dilakukan pada hipotesis pertama yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis Uji F ini dilakukan dengan membandingkan antar F_{hitung} dengan F_{tabel} .

- a. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $p \text{ value} > \alpha$ dikatakan tidak signifikan, karena itu H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dikatakan tidak signifikan, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan satu (1). Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

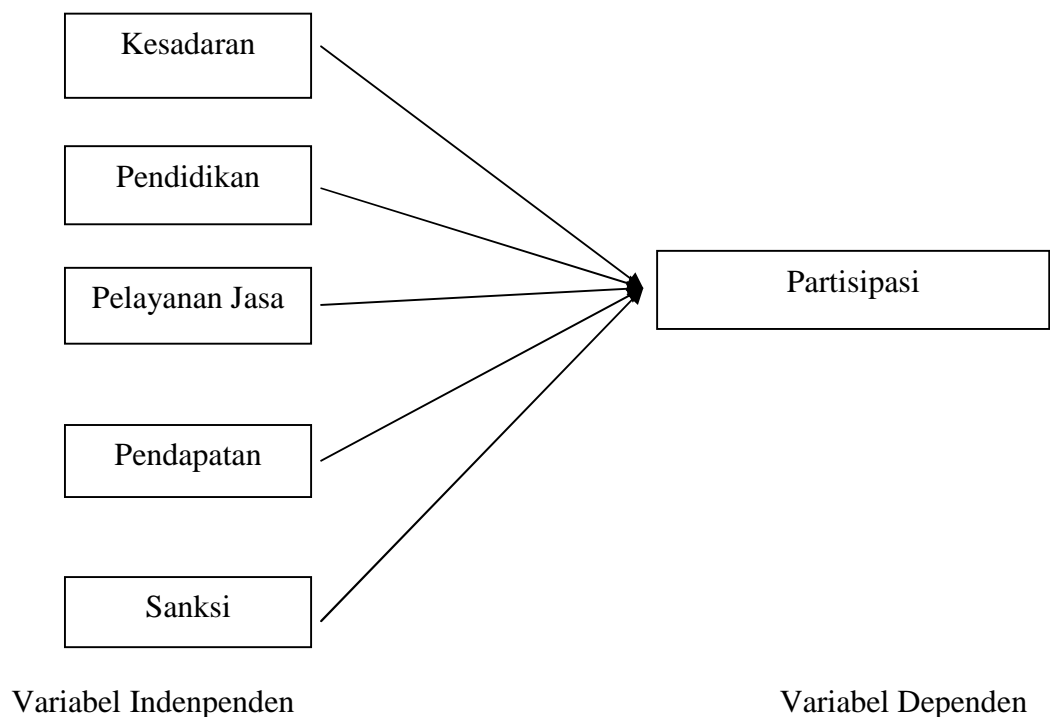
Sebaliknya, semakin besar koefisien determinasi maka akan semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persamaan regresi persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk menestimasi nilai variabel dependen.

3.7 Model Penelitian

Untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada penelitian berikut ini.

Gambar III . 1

Model penelitian



3.8 Hipotesis Penelitian

- H1 : Diduga Kesadaran mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak.
- H2 : Diduga Pendidikan mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak.
- H3 : Diduga Pelayanan Jasa mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak.
- H4 : Diduga Pendapatan mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak.
- H5 : Diduga Sanksi mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak.

3.9 Variabel Penelitian

Variabel Dependen : - Partisipasi (Y)

Variabel Independen : - Kesadaran (X1)
- Pendidikan (X2)
- Pelayanan jasa (X3)
- Pendapatan (X4)
- Sanksi (X5)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Identitas Responden

Populasi penelitian ini yang dijadikan responden adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang berada dikecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2007:73). Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel diambil dari sebagian jumlah populasi yang di nilai dengan mewakili kesekuruhan responden penelitian.

Dalam penelitian ini untuk penerikan sampel peneliti menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan yang ditoleransi dalam sampel adalah (10 %).

Berikut ini jumlah kuesioner yang disebarakan sebanyak 100 rangkap disebarakan pada tanggal 8 – 17 mei 2012 kepada responden yang menjadi sampel penelitian, dimana hasil distribusi koesionernya sebagai berikut :

Tabel IV. 1

Hasil Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Total	Presentase
1.	Jumlah kuesioner yang disebarakan	100	100 %
2.	kuesioner diterima	100	100 %
3.	kuesioner yang tidak lengkap	0	0%
4.	Keusioner yang tidak kembali	0	0%

Berdasarkan tabel IV. 1 dapat di jelaskan bahwa peneliti menyebarkan 100 rangkap kuesioner, kuesioner yang diterima 100 rangkap atau 100%, kuesioner yang tidak kembali adalah 0 %, dan kuesioner yang tidak lengkap atau rusak adalah 0 % juga. Jadi total kuesioner yang dapat diolah keseluruhannya adalah 100 rangkap atau 100 %.

Tabel IV. 2
Profil Responden (N=100)

KETERANGAN	FREKUENSI	PERSENTASE
Jenis Kelamin :		
a. Pria	83	83%
b. Wanita	17	17%
Umur :		
a. < 30 tahun	6	6%
b. 31- 40 tahun	69	69%
c. > 40 tahun	25	25%
Penghasilan perbulan :		
a. < Rp 2.000.000	15	15%
b. Antara Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000	68	68%
c. > Rp 5.000.000	17	17%
Pendidikan Terakhir :		
a. SD/Sederajat	47	47%
b. SMP/Sederajat	13	13%
c. SMA/Sederajat	26	26%
d. S1/Sederajat	14	14%

Pekerjaan :		
a. Petani	57	57%
b. Pegawai Swasta	10	1%
c. Pegawai Negeri	9	9%
d. Wiraswasta	24	24%

Sumber : Pengolahan Data Hasil penelitian

Deskripsi profil responden terdiri dari jenis Kelamin, Umur, Penghasilan Perbulan, Tamatan terakhir, dan Pekerjaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini responden yang memiliki jenis kelamin yang bervariasi diantaranya adalah Laki-laki sebanyak 83 responden atau 83%, perempuan sebanyak 17 responden atau 17 %.

Berdasarkan umur responden yang berumur < 30 sebanyak 6 responden atau 6 %, 31- 40 sebanyak 69 responden atau 69%, dan yang diatas > 40 adalah sebanyak 25 responden atau 25%.

Berdasarkan penghasilan perbulan yang memiliki penghasilan < 2.000.000 adalah 15 responden atau 15%, 2.000.000-5.000.000 68 responden atau 68%. Dan penghasilan > 5.000.000 17 responden atau 17%.

Berdasarkan jenjang pendidikan yakni tamatan SD sederajat 47 responden atau 47%, SMP sederajat adalah 13% responden atau 13%, SMA sederajat adalah 26 responden atau 26%, dan Serjana S1 sederajat adalah 14 responden atau 14%.

Berdasarkan pekerjaan Petani adalah 57 responden atau 57%, Wiraswasta adalah 24 responden atau 24%, Pegawai swasta adalah 10 responden atau 10%, Pegawai negeri adalah 9 responden atau 9%.

Analisa dilakukan terhadap 100 sampel responden yang telah memenuhi kriteria untuk dapat diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan dalam statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel IV. 3
Statistik Deskriptif Responden

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran	100	8.00	25.00	19.5800	3.42357
Pendidikan	100	12.00	25.00	19.8300	2.73050
Pelayanan Jasa	100	12.00	25.00	19.6600	2.88577
Pendapatan	100	8.00	20.00	14.8900	2.88813
Sanksi	100	8.00	25.00	19.4900	3.43039
Partisipasi	100	7.00	20.00	14.8200	3.18893
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Pengolahan SPSS Hasil Penelitian

Dalam tabel IV. 3 terlihat bahwa variabel Kesadaran mempunyai nilai minimum 8.00 nilai maximum 25.00 dan nilai rata-rata 19.5800. jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 19.5800 maka responden mempunyai pemahaman tentang kesadaran yang lebih tinggi.

Pendidikan mempunyai nilai minimum 12.00 nilai maximum 25.00 dan nilai rata-rata 19.8300. jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari

19.8300 maka responden mempunyai pemahaman tentang Pendidikan yang lebih tinggi.

Pelayanan Jasa mempunyai nilai minimum 12.00 nilai maximum 25.00 dan nilai rata-rata 19.6600. jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 19.6600 maka responden mempunyai pemahaman tentang Pelayanan Jasa yang lebih tinggi.

Pendapatan mempunyai nilai minimum 12.00 nilai maximum 25.00 dan nilai rata-rata 19.8900. jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 19.8900 maka responden mempunyai pemahaman tentang Pendapatan yang lebih tinggi.

Sanksi mempunyai nilai minimum 8.00 nilai maximum 25.00 dan nilai rata-rata 19.4900. jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 19.4900 maka responden mempunyai pemahaman tentang Sanksi yang lebih tinggi.

Partisipasi mempunyai nilai minimum 7.00 nilai maximum 20.00 dan nilai rata-rata 14.8200. jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 14.8200 maka responden mempunyai pemahaman tentang Partisipasi yang lebih tinggi.

4.2 Pengujian Kualitas Data

Sebelum data yang terkumpul dianalisis perlu diuji validitas dan reabilitas. Pengujian ini akan menentukan layakannya data untuk dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan uji validitas dan reabilitas instrument penelitian yang dilakukan terhadap seluruh item yang digunakan, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel. Oleh karena itu kuesionernya layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian ini.

4.2.1 Hasil Uji Validitas Variabel Instrumen

1. Validitas Variabel Kesadaran

Tabel IV. 4

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Kesadaran

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1.1	15.5400	7.665	.630	.689	.739
x1.2	15.5800	8.428	.466	.323	.790
x1.3	15.7100	7.622	.693	.543	.721
x1.4	15.6800	7.876	.553	.679	.764
x1.5	15.8100	7.832	.550	.443	.766

Sumber : Pengolahan data SPSS Hasil Penelitian

Variabel Kesadaran dinyatakan dalam 5 butir pernyataan yang dinyatakan dalam skala likert. Seluruh pertanyaan tersebut dinyatakan valid jika dilihat dari output pengujian validitas ini dan memenuhi syarat untuk valid karena memiliki korelasi > 0.30 .

2. Validitas Variabel Pendidikan

Tabel IV. 5

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Pendidikan

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x2.1	15.7300	5.149	.403	.524	.631
x2.2	15.9600	5.049	.479	.779	.596
x2.3	15.8800	5.056	.480	.251	.596
x2.4	15.8800	5.157	.371	.536	.647
x2.5	15.8700	5.407	.399	.766	.631

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian

Pada variabel Pendidikan (X2) terlihat bahwa seluruh item pernyataan memenuhi syarat untuk valid karena memiliki korelasi > 0.30 .

3. Validitas Variabel Pelayanan Jasa

Tabel IV. 6

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Pelayanan Jasa

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x3.1	15.7700	5.654	.493	.461	.768
x3.2	15.7000	5.768	.553	.469	.747
x3.3	15.6700	5.799	.534	.605	.753
x3.4	15.7500	5.785	.489	.451	.768
x3.5	15.7500	5.078	.752	.723	.679

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian

Pada variabel Pelayanan Jasa (X3) terlihat bahwa seluruh item pernyataan memenuhi syarat untuk valid karena memiliki korelasi > 0.30 .

4. Validitas Variabel Pendapatan

Tabel IV. 7

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Pendapatan

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x4.1	11.3200	4.280	.684	.476	.520
x4.2	11.0500	5.442	.450	.268	.676
x4.3	11.0800	6.256	.331	.223	.735
x4.4	11.2200	4.598	.545	.342	.619

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian

Pada variabel Pendapatan (X4) terlihat bahwa seluruh item pernyataan memenuhi syarat untuk valid karena memiliki korelasi > 0.30 .

5. Validitas Variabel Sanksi

Tabel IV. 8

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Sanksi

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x5.1	15.4700	7.646	.620	.698	.717
x5.2	15.5100	8.616	.426	.300	.781
x5.3	15.6500	7.684	.648	.459	.709
x5.4	15.6100	7.836	.553	.696	.740
x5.5	15.7200	7.941	.535	.396	.747

Sumber : pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian

Pada variabel Sanksi (X5) terlihat bahwa seluruh item pernyataan memenuhi syarat untuk valid karena memiliki korelasi > 0.30 .

6. Validitas Variabel Partisipasi

Tabel IV. 9

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Partisipasi

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y.1	11.1400	5.758	.607	.400	.629
y.2	11.2500	5.745	.634	.429	.614
y.3	10.9500	6.634	.509	.287	.689
y.4	11.1200	6.753	.382	.151	.761

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian

Pada variabel Pendidikan (Y) terlihat bahwa seluruh item pernyataan memenuhi syarat untuk valid karena memiliki korelasi > 0.30 .

4.2.2 Hasil Rekapitulasi Uji Reliabilitas Variabel Instrumen

Pengujian reliabilitas ini menggunakan Cronbach Alpha dengan tafsiran batasan minimal 0,60. Berikut ini menerangkan hasil pengujian reliabilitas untuk setiap variabel dalam penelitian ini.

Tabel IV.10

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
Kesadaran	0.796	Reliabel
Pendidikan	0.671	Reliabel
Pelayanan Jasa	0.785	Reliabel
Pendapatan	0.711	Reliabel
Sanksi	0.780	Reliabel

Partisipasi	0.737	Reliabel
-------------	-------	----------

Berdasarkan tabel 5.8 dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen Kesadaran (X1) menunjukkan Nilai Cronbach Alpha 0.796, koefisien reliabilitas instrumen Pendidikan (X2) menunjukkan Nilai Cronbach Alpha 0.671, koefisien reliabilitas instrumen Pelayanan Jasa (X3) menunjukkan Nilai Cronbach Alpha 0.785, koefisien reliabilitas instrumen Pendapatan (X4) menunjukkan Nilai Cronbach Alpha 0.711, koefisien reliabilitas instrumen Sanksi (X5) menunjukkan Nilai Cronbach Alpha 0.780, koefisien reliabilitas instrumen Partisipasi (Y) menunjukkan Nilai Cronbach Alpha 0.737. dengan hasil tersebut dapat diartikan bahwa seluruh variabel dapat digunakan pada analisis selanjutnya karena nilai Alpha >0.6.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Modal regresi akan menghasilkan estimator tidak bias yang baik apabila memenuhi asumsi klasik sebagai berikut :

4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diteliti untuk keseluruhan indikator dan variabel tersebut bersifat normal. Uji Normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorov-smirnov*, kriteria ujinya adalah jika setiap variabel menghasilkan K-S-Z dengan Asymp. sig. (2-tailed) > 0.05 hal ini menunjukkan bahwa data normal dan sebaliknya.

Tabel IV. 11
Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.35940793
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.062
	Negative	-.095
Kolmogorov-Smirnov Z		.954
Asymp. Sig. (2-tailed)		.322

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa Asymp. sig.(2-tailed) > 0.05. berarti data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi Klasik Multikolinearitas, yaitu danya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Menurut Santoso dalam Duwi (2009) pada umumnya jika Varians Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 atau nilai tolerance besar atau sama dengan 0,10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya dan begitu juga sebaliknya.

Tabel IV. 12
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.578	1.567		2.283	.025		
Kesadaran	-.289	.305	-.310	-.948	.346	.018	5.976
Pendidikan	-.230	.087	-.197	-2.637	.010	.345	2.900
Pelayanan Jasa	-.024	.049	-.022	-.493	.623	.955	1.047
Pendapatan	1.009	.049	.914	20.604	.000	.972	1.028
Sanksi	.354	.318	.381	1.114	.268	.016	5.119

a. Dependent Variable:

Partisipasi

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian

Pada tabel IV. 12 terlihat bahwa variabel Kesadaran (X1) mempunyai nilai Tolerance 0.018 dan nilai VIF 5.976, variabel Pendidikan (X2) mempunyai nilai Tolerance 0.345 dan nilai VIF 2.900, variabel Pelayanan Jasa (X3) mempunyai nilai Tolerance 0.955 dan nilai VIF 1.047, variabel Pendapatan (X4) mempunyai nilai Tolerance 0.972 dan nilai VIF 1.028, variabel Sanksi (X5) mempunyai nilai Tolerance 0.016 dan nilai VIF 5.119. jadi dapat di simpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen, sehingga dapat diputuskan bahwa semua variabel bebas multikolinearitas dan layak digunakan karena VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0.10.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi dapat dilihat dari besaran nilai Durbin-Watson (DW). Kriterianya sebagai berikut :

1. Jika D-W dibawah -2 berarti ada Autokorelasi Positif
2. Jika D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada Autokorelasi
3. Jika D-W dibawah +2 berarti ada Autokorelasi Negatif

Tabel IV. 13

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.906 ^a	.820	.810	1.38847	1.601

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Pendapatan, Pelayanan Jasa, Pendidikan, Kesadaran

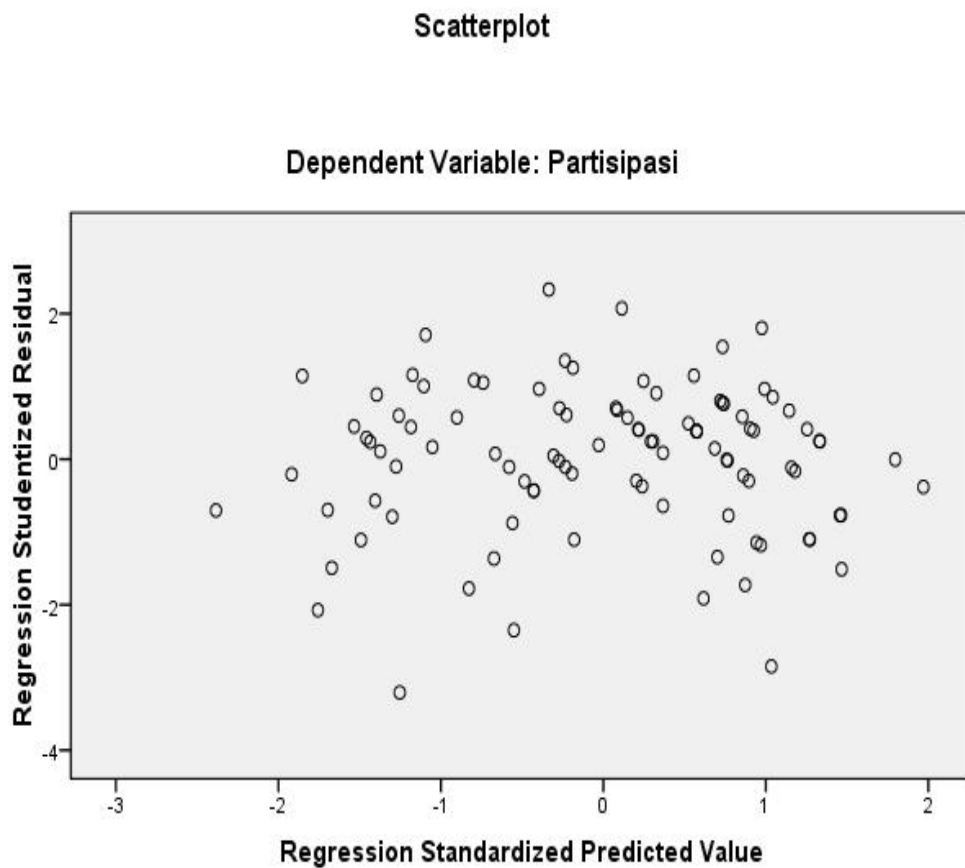
b. Dependent Variable: Partisipasi

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian

Dalam hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai DW adalah sebesar 1.601, hal ini berarti model regresi diatas tidak dapat masalah autokorelasi.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas.

Gambar IV. 14
Scatterplot Heteroskedastisitas



Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian

Dari grafik diatas, terlihat titik-titik yang menyebarkan secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi hetoskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Y.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui antara satu variabel terikat (dependent variabel) dengan dua atau lebih variabel (independent variabel). Pengolahan data ini menggunakan multi regression dengan bantuan program SPSS (Statistik Service Solution) 16.0 dalam melakukan regresi dilakukan dengan metode enter.

Pada metode enter semua variabel Independen digunakan sebagai predictor atas kriteria dalam penelitian ini, tidak ada variabel yang dikeluarkan. Dengan demikian semua variabel independen digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan pengaruh terhadap variabel dependen. Gambaran umum hasil analisa regresi dengan metode enter dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV. 15

Hasil Analisis Regresi Uji Linear Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.578	1.567		2.283	.025		
Kesadaran	-.289	.305	-.310	-.948	.346	.018	5.976
Pendidikan	-.230	.087	-.197	-2.637	.010	.345	2.900
Pelayanan Jasa	-.024	.049	-.022	-.493	.623	.955	1.047
Pendapatan	1.009	.049	.914	20.604	.000	.972	1.028
Sanksi	.354	.318	.381	1.114	.268	.016	5.119

a. Dependent Variable:

Partisipasi

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian

Dari koefisien linear diatas, dapat diketahui persamaan regresi linear berganda dalam analisis sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

$$Y = 3.578 - 0.289X_1 - 0.230X_2 - 0.024X_3 + 1.009X_4 + 0.354X_5$$

1. Nilai konstanta sebesar 3.578, menyatakan bahwa jika variabel independen tetap atau bernilai nol maka variabel devenden adalah sebesar 3.578 dianggap konstan.
2. Koefisien regresi variabel Kesadaran sebesar -0.289, artinya jika kesadaran mengalami kenaikan atau tetap satu tahun, maka Partisipasi akan mengalami penurunan sebesar -0.289 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
3. Koefisien regresi variabel Pendidikan sebesar -0.230, artinya jika Pendidikan mengalami kenaikan satu tahun, maka partisipasi akan mengalami penurunan sebesar -0.024 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
4. Koefisien regresi variabel Pelayanan jasa sebesar -0.024, artinya jika Pelayanan jasa mengalami kenaikan satu tahun, maka partisipasi akan mengalami penurunan sebesar -0.024 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
5. Koefisien regresi variabel Pendapatan sebesar 1.009, artinya jika Pendidikan mengalami kenaikan satu tahun, maka partisipasi akan mengalami peningkatan sebesar 1.009 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

6. Koefisien regresi variabel Sanksi sebesar 0.354, artinya jika Pendidikan mengalami kenaikan satu tahun, maka partisipasi akan mengalami peningkatan sebesar 0.354 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

4.5.2 Pengujian Variabel Secara Parsial (T)

Untuk menguji signifikansi koefisien regresi dari variabel independen dengan variabel dependen, maka dilakukan Uji t. Uji t dianalisis dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ berarti variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, sebaliknya $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Dalam hal ini tingkat Alpha adalah 0.05. dan *degree of freedom* (df) = n-k

- a. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau p value > α dikatakan tidak signifikan, dan Hipotesis penelitian ditolak.
- b. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ dikatakan signifikan, dan hipotesis diterima.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 16.0 diperoleh koefisien regresi variabel bebas sebagai berikut :

Tabel IV.16
Hasil Pengujian Hipotesis

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.578	1.567		2.283	.025
Kesadaran	-.289	.305	-.310	-.948	.346
Pendidikan	-.230	.087	-.197	-2.637	.010
Pelayanan Jasa	-.024	.049	-.022	-.493	.623
Pendapatan	1.009	.049	.914	20.604	.000
Sanksi	.354	.318	.381	1.114	.268

a. Dependent Variable: Partisipasi

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian

$$T_{tabel} = 0.05 ; n-k$$

$$0,05; 100-6$$

$$0.05 ; 94$$

$$T_{tabel} = 1.985$$

1. Pengujian H₁ : Kesadaran

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien Kesadaran -0.289 berarti ada hubungan negatif antara Kesadaran dengan Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk uji t diperoleh hasil sebagai berikut :

$$t_{hitung} \text{ sebesar } -0.948$$

$$t_{tabel} \text{ sebesar } 1.985$$

$$t_{hitung} < t_{tabel}, \text{ maka } H_1 \text{ ditolak}$$

Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat. Banyak faktor yang terdapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, salah satu faktor tersebut dapat berasal dari kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menganggap bahwa kesadaran masyarakat sudah optimal, dimana mereka yang mengatakan kesadaran sudah optimal tersebut adalah masyarakat yang rajin dalam membayar pajak setiap tahunnya. Akan tetapi kenyataannya dalam penelitian ini Kesadaran tersebut tidak berpengaruh terhadap Partisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pengujian H₂ : Pendidikan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien Pendidikan -0.230 berarti ada hubungan negatif antara Kesadaran dengan Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk uji t diperoleh hasil sebagai berikut :

t_{hitung} sebesar -2.637

t_{tabel} sebesar 1.985

$t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H₂ diterima

Dengan demikian, bahwa Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan penelitian banyak faktor yang terdapat berpengaruh terhadap partisipasi untuk tidak menjadi wajib pajak yang baik. Salah satu faktor yang berpengaruh

tersebut dapat berasal dari akademik, dimana wajib pajak yang mempunyai pengetahuan pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi seharusnya memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan lebih baik dibandingkan wajib pajak yang memiliki pendidikan yang lebih rendah.

3. Pengujian H₃ : Pelayanan Jasa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien Pelayanan Jasa -0.224 berarti ada hubungan negatif antara Pelayanan Jasa dengan Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk uji t diperoleh hasil sebagai berikut :

t_{hitung} sebesar -0.493

t_{tabel} sebesar 1.985

$t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H₃ ditolak

Hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan Jasa dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat. Hal ini dikarenakan pelayanan jasa yang diberikan oleh kantor pajak masih jauh dari keinginan masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini pelayanan jasa merupakan faktor perangsang wajib pajak untuk membayar pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan maka semakin baik juga tingkat partisipasinya. Baik buruknya pelayanan di sebabkan oleh para pegawai yang bertugas atau yang memungut pajak kurang disiplin atau mereka masih menganggap bahwa pelayanan itu tidak akan berpengaruh apa-apa.

2. Pengujian H_4 : Pendapatan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien Pendapatan 1.009 berarti ada hubungan positif antara Pendapatan dengan Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk uji t diperoleh hasil sebagai berikut :

t_{hitung} sebesar 20.604

t_{tabel} sebesar 1.985

$t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_4 diterima

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pengujian H_5 : Sanksi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien Sanksi 0.354 berarti ada hubungan negatif antara Sanksi dengan Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk uji t diperoleh hasil sebagai berikut :

t_{hitung} sebesar 1.114

t_{tabel} sebesar 1.985

$t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_5 ditolak

Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat. Hal ini dikarenakan Sanksi yang diberikan oleh kantor pajak tidak diindahkan baik oleh kantor pajak maupun masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam penelitian ini sanksi yang diterapkan untuk wajib pajak merupakan faktor yang menginspirasi atau melatarbelakangi partisipasi karena dengan adanya sanksi berat maka wajib pajak akan merasa keberatan sehingga wajib pajak membayar pajak dengan tetap waktu.

4.5.3 Uji Pengujian Variabel Secara Simultan (F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah Variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat. Untuk membuktikan hal tersebut, maka dilakukan uji F.

Tabel IV.17
Hasil Pengujian Hipotesis

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	825.542	5	165.108	85.644	.000 ^a
	Residual	181.218	94	1.928		
	Total	1006.760	99			

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Pendapatan, Pelayanan Jasa, Pendidikan, Kesadaran

b. Dependent Variable: Partisipasi

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian

Uji statistik ini akan berpengaruh $F_{hitung} > F_{tabel}$. dari hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel ANOVA diperoleh F_{hitung} sebesar 85.644 F_{tabel} sebesar 2.311 dengan nilai signifikan 0.000 berada dibawah 0.05 hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas (variabel Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan dan Sanksi) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (Partisipasi masyarakat).

$$F_{\text{tabel}} = (k-1) ; (n-k)$$

$$(6-1) ; (100-6)$$

$$5 ; 94$$

$$F_{\text{tabel}} = 2.311$$

4.5.4 Koefisien Determinasi R²

Nilai R² digunakan untuk mengetahui seberapa baik suatu model yang diterapkan dapat menjelaskan variabel dependennya. Apabila R² bernilai 0 maka dapat dikatakan bahwa tidak ada variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh hubungan tersebut, namun jika R² nilai satu maka dapat dikatakan bahwa semua variasi variabel dapat dijelaskan. Dengan demikian R² bernilai 0-1. Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan R² dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.

Tabel IV.18

Hasil Koefisien Determinasi R²

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.906 ^a	.820	.810	1.38847	1.601

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Pendapatan, Pelayanan Jasa, Pendidikan, Kesadaran

b. Dependent Variable: Partisipasi

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel IV.17 diperoleh nilai R sebesar 0.906^a dan Adjusted R square sebesar 0.810 atau 81 %. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hubungan keceratan secara bersama-sama antara variabel dependen dengan variabel

independen yang cukup kuat, karena R lebih besar dari 0.5 ($R > 0.50$) dan dianggap tidak mendekati angka 1. nilai Adjusted R square sebesar 0.810 atau 81 % artinya Partisipasi Masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh faktor-faktor Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan dan Sanksi, dan dipengaruhi juga oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti sebesar 19 %.

1.6 Pembahasan

1. Kesadaran

Banyak faktor yang terdapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, salah satu faktor tersebut dapat berasal dari kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menganggap bahwa kesadaran masyarakat sudah optimal, dimana mereka yang mengatakan kesadaran sudah optimal tersebut adalah masyarakat yang rajin dalam membayar pajak setiap tahunnya. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.

Untuk Uji t variabel kesadaran diperoleh hasil sebagai berikut :

t_{hitung} sebesar -0.948

t_{tabel} sebesar 1.985

$t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_1 ditolak

Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperluakn dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satu faktor yang berpengaruh tersebut dapat berasal dari akademik, dimana wajib pajak yang mempunyai pengetahuan pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi seharusnya memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan lebih baik dibandingkan wajib pajak yang memiliki pendidikan yang lebih rendah.

Untuk Uji t variabel Pendidikan diperoleh hasil sebagai berikut :

t_{hitung} sebesar -2.637

t_{tabel} sebesar 1.985

$t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_2 diterima

Dengan demikian, bahwa Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Pelayana Jasa

Tingkat pelayanan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor yang merangsang wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, apabila wajib pajak mempunyai dasar atau pengalaman dalam membayar pajak dengan pelayanan yang baik, mudah dan aman, maka tingkat partisipasi dapat di pertahankan. Sebaliknya apabila pembayaran pajak tersebut banyak kendala maka wajib pajak akan merasa enggan untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Untuk Uji t variabel Pelayanan Jasa diperoleh hasil sebagai berikut :

t_{hitung} sebesar -0.493

t_{tabel} sebesar 1.985

$t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_3 ditolak

Hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan Jasa dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat. Hal ini dikarenakan pelayanan jasa yang diberikan oleh kantor pajak masih jauh dari keinginan masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini pelayanan jasa merupakan faktor perangsang wajib pajak untuk membayar pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan maka semakin baik juga tingkat partisipasinya. Baik buruknya pelayanan di sebabkan oleh para pegawai yang bertugas atau yang memungut pajak kurang disiplin atau mereka masih menganggap bahwa pelayanan itu tidak akan berpengaruh apa-apa.

4. Pendapatan

Pendapatan adalah suatu arus masuk aset atau penyelesaian kewajiban dari penyebaran atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan selama satu periode.

Untuk Uji t Variabel pendapatan diperoleh hasil sebagai berikut :

t_{hitung} sebesar 20.604

t_{tabel} sebesar 1.985

$t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_4 diterima

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Sanksi

Dalam penelitian ini sanksi yang diterapkan untuk wajib pajak merupakan faktor yang menginsirasikan atau melatarbelakangi partisipasi karena dengan adanya sanksi berat maka wajib pajak akan merasa keberatan sehingga wajib pajak membayar pajak dengan tetap waktu. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan per Undang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (pencegah) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Untuk Uji t variabel Sanksi diperoleh hasil sebagai berikut :

t_{hitung} sebesar 1.114

t_{tabel} sebesar 1.985

$t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_5 ditolak

Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat. Hal ini dikarenakan Sanksi yang diberikan oleh kantor pajak tidak diindahkan baik oleh kantor pajak maupun masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum hasil pengujian validitas dan reabilitas item pertanyaan penelitian telah memberikan hasil yang baik. koefisien menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* 0.796, 0.671, 0.785, 0.711, 0.780, dan 0.737. nilai *cronbach's alpha* semua variabel > 0.06 , dan pengujian validitas terhadap seluruh item pertanyaan dengan menggunakan *corrected item-total correlation* menunjukkan bahwa item-item pertanyaan dinyatakan valid karena *corrected item-total correlation* > 0.30 .
2. Hasil regresi parsial menunjukkan bahwa variabel Kesadaran secara Statistik t_{hitung} sebesar $-0.948 < t_{tabel}$ sebesar 1.985 maka H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat.
3. Hasil regresi parsial menunjukkan bahwa variabel Pendidikan secara Statistik t_{hitung} sebesar $-2.637 > t_{tabel}$ sebesar 1.985 maka H_2 diterima. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Hasil regresi parsial menunjukkan bahwa variabel Pelayanan jasa secara Statistik t_{hitung} sebesar $-0.493 < t_{tabel}$ sebesar 1.985 maka H_3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan Jasa dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat.
5. Hasil regresi parsial menunjukkan bahwa variabel Pendapatan secara bahwa t_{hitung} sebesar $20.604 > t_{tabel}$ sebesar 1.985, maka H_4 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Hasil regresi parsial menunjukkan bahwa variabel Partisipasi secara Statistik t_{hitung} sebesar $1.114 < t_{tabel}$ sebesar 1.985 maka H_5 ditolak, Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat.
7. Berdasarkan uji f diperoleh f_{hitung} (85.644) $> f_{tabel}$ (2.311) hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima dan menunjukkan juga variabel bebas (variabel Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan dan Sanksi) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (Partisipasi masyarakat).
8. Berdasarkan koefisien determinasi R^2 atau Adjusted R square diperoleh 0.810 atau 81 %. Hal ini menunjukkan semua variabel secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 81 % sedangkan

sisanya 19 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini masih banyak kekurangan atau keterbatasan. Keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini yang memungkinkan memberi pengaruh pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini hanya mencari pengaruh Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan dan Sanksi terhadap Partisipasi Masyarakat, sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam memayar Pajak Bumi dan Bangunan.

5.3 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dijelaskan, maka dengan ini penulis akan mencoba memberikan saran kepada pihak yang terkait yaitu :

1. Kepada masyarakat Wajib Pajak diharapkan mempunyai rasa kesadaran yang tinggi untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, agar dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat merasa puas dan nyaman terhadap layanan yang diberikan.
3. Dispenda perlu mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang perpajakan umumnya dan PBB khususnya agar Partisipasi masyarakat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'an Surah At-Taubah Ayat 29
- Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi tahun 2008, PT. Raja Grafindo Persada ; Jakarta.
- Dwi Priyatno, 2009, *Mandiri Belajar SPSS*, PT. Mediakom : Yogyakarta.
- , 2011, *Buku Saku SPSS (Analisis Statistik Data Lebih Cepat, Efisien, Dan Akurat)*, PT. Medikom : Yogyakarta.
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Irianto, SE, 2009, *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*, UII Press ; Yogyakarta.
- Ilyas, Wirawan b. Dan Richard Burton, 2010, *Hukum Pajak*, Selemba Empat ; Jakarta.
- Liberty Pandiangan, 2010, *Undang-undang perpajakan Indonesia*, PT. Gelora Aksara Pertama ; Jakarta.
- Mardiasmo , 2010, *Perpajakan*, CV. Andi Offset ; Yogyakarta
- Marithot P. Siahaan, SE, 2009, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Nurmantu, Safri, 2009, *Pengantar Perpajakan*, Yayasan Obor Indonesia ; Jakarta
- Rochmat Soemitro, S. (2007), *Dasar-dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, Jakarta.
- Sakaran, 2005. *Research Method For Business 3rd Edition*. Jhon Wiley & Sonc.Inc
- Setiawan, Agus dkk, 2009, *Perpajakan Umum*, PT. Raja Grafindo Persada ; Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2005, *Administrasi Pembangunan*, PT. Bumi Aksara : Jakarta.
- Sugiyono, 2007, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.